



[Home](#)   [TSPP](#)   [Noken \(Editorial\)](#)   [Laporan Utama](#)   [Berita Hari Ini](#)

[Rubrikasi](#)   [Program](#)   [Produk](#)   [Hubungi Kami](#)   [Arsip](#)

TABLOID SUARA PEREMPUAN PAPUA | Jl. Bosnik - Puskopad Tanah Hitam Abep  
- Jayapura - Papua | Telp/Fax. (0967) 584154

Sabtu, 22 Juni 2013 14:36

## Menghapus Nuklir sebagai Mata Uang Geopolitik

Ditulis oleh Thalif Deen

ukuran huruf

Cetak

Email

Jadilah yang perta

Taksir item ini

(0 pilihan)

**PBB (IPS) – KETIKA 193 anggota Majelis Umum PBB menghe**  
pertemuan tingkat tinggi untuk kali pertama mengenai pelucu  
senjata nuklir pada September nanti, ada sedikit atau tak a  
harapan bahwa negara-negara yang punya kekuatan nuklir al  
bikin komitmen kuat untuk secara bertahap mengurangi a  
menghapus persenjataan mematikan mereka.

Pada awal 2013, delapan negara –Inggris, AS, Rusia, Pran  
China, India, Pakisan, dan Israel– memiliki sekira 4.400 senj  
nuklir operasional, menurut Yearbook terbaru yang di  
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Hampir 2.000 senjata itu disimpan dalam keadaan siaga operasional tinggi, menurut :  
Jonathan Granoff, ketua Global Security Institute dan asisten profesor Hukum Internasional  
Widener University School of Law, berkata, “Apa yang dibutuhkan untuk melawan lamba  
kontrol dan pelucutan senjata ialah profil politik yang lebih tinggi.”

satu dari 114 negara di zona bebas senjata nuklir. Kami ingin membantu negara-negara mengandalkan senjata nuklir dengan alasan keamanan untuk mendapatkan manfaat dari ban ini guna menciptakan seluruh dunia zona bebas senjata nuklir.

Copyright © 2013, SUARA PEREMPUAN PAPUA. Powered by Papua Host

Laporan SIPRI menyoroti perlunya membawa komitmen yang dibuat dengan sungguh-sungguh pada Konferensi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) Review pada 2012 guna memperlucutan senjata nuklir ke dalam tindakan. Janji harus dibarengi sesuatu, ujar Granoff.

Bila semua hulu ledak nuklir dihitung, menurut SIPRI, kedelapan negara itu memiliki sekitar 17 senjata nuklir, turun dari 19.000 pada awal 2012

Penurunan itu terutama disebabkan Rusia dan AS telah mengurangi persediaan senjata strategis mereka sesuai persyaratan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) serta ada senjata yang sudah uzur dan usang.

Pada saat yang sama, tulis SIPRI, lima negara yang diakui secara hukum memiliki senjata nuklir –China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS– mengembangkan sistem pengiriman senjata nuklir atau telah mengumumkan program serupa, dan tampaknya bertekad mempertahankan persenjataan nuklir mereka tanpa batas.

Dari kelima negara, hanya China yang tampaknya akan mengembangkan senjata nuklirnya.

Adapun negara lain, India dan Pakistan, meningkatkan cadangan senjata nuklir mereka kemampuan pengiriman rudal. “Sekali lagi hanya ada sedikit harapan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir bersedia sungguh-sungguh menyerahkan senjata nuklir mereka,” menurut SIPRI.

“Program modernisasi jangka panjang yang berlangsung di negara-negara ini menunjukkan senjata nuklir masih jadi penanda status dan kekuatan internasional,” kata Shannon Kile, peneliti senior Proyek Pengendalian, Pelucutan, dan Nonproliferasi Senjata Nuklir di SIPRI.

Ditanya apakah konferensi pelucutan nuklir mendatang akan menghasilkan aksi nyata penghapusan senjata nuklir, Kile berkata bahwa, di tengah tren senjata nuklir global saat ini, Majelis Umum PBB tak bisa diharapkan mampu mengambil langkah-langkah kongkret, yang mewajibkan negara-negara pemilik senjata nuklir mulai menghapuskan senjata itu mengubah postur dan praktik operasional kekuatan nuklir mereka.

Namun, Majelis Umum PBB dapat berperan positif dalam hal penguatan norma dan kebijakan politik yang berlaku sekarang guna mengupayakan pelucutan senjata nuklir yang semestinya boleh dianggap remeh, ujar Kile.

Hal itu berarti, pertama dan terpenting, mempertahankan tekanan politik terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengurangi peran dan arti penting senjata nuklir dalam strategi



Itu bisa dilakukan, misalnya, dengan mengajak negara-negara tersebut menerapkan deklarasi terbuka yang mengesampingkan penggunaan senjata nuklir, dan member keamanan yang mengikat secara hukum, yakni menjamin tidak digunakannya s terhadap negara-negara nonnuklir.

Dalam jangka panjang, ujarnya, Majelis Umum PBB dapat berkontribusi dan memp menghapus senjata nuklir sebagai matauang geopolitik internasional dan me kepemilikan senjata itu.

"Ini memang akan jadi bagian dari suatu proses jangka panjang yang membutuhka dan ketekunan diplomatik tapi nilai normatifnya tak boleh diabaikan," tambah Kile.

Granoff berkata, beberapa bagian dari pemerintahan Presiden Barack Obama i perlunya meratifikasi Perjanjian START dalam Senat AS, termasuk modernisasi a nuklir. Beberapa memandang modernisasi hanya menyimpan senjata dalam k sementara yang lain meningkatkan akurasi dan keunggulannya dan bisa ditafsi bentuk proliferasi vertikal.

"Kegiatan itu tak boleh didanai, tapi bahkan jika pun ada, aktivitas ini tidak ditera perencanaan strategis geo militer," ujarnya. Namun, katanya, itu tak berarti tinda menegaskan status senjata nuklir atau komitmen untuk membatalkan janji di bawah dunia bebas senjata nuklir.

"Mereka hanya mewakili kesepakatan-kesepakatan politik jangka pendek dalam lingkur di dalam negeri yang kuat untuk mencapai langkah-langkah pengendalian senjata ya kata Pile. Tapi mengatakan kebijakan itu tak bergerak ke arah yang benar a tambahanya.

Granoff berujar ada kelompok kerja terbuka baru di Jenewa yang akan mendesaki rekomendasi. Norwegia baru-baru ini menjadi tuan rumah konferensi besar yang d negara, yang menyoroti konsekuensi kemanusiaan mengerikan dari senjata nuklir. pertanda baik bagi masa depan kita, ujarnya.

"Anehnya, negara-negara pemilik senjata nuklir atau P5 (Inggris, AS, Rusia, Prancis, d berpartisipasi dalam kegiatan itu," tambah Granoff. "Namun, mereka dapat beker datang dengan strategi dan posisi yang sama kalau mereka mau."

"Tugas kita membantu mendorong isu penghapusan senjata nuklir menaiki tangga po mereka mau bekerjasama dalam pelucutan senjata," katanya.

Ditanya mengenai tak disertakannya Korea Utara dalam daftar negara pemilik senja berkata, "Bagian dari bab kekuatan nuklir dalam Yearbook yang berhubun kemampuan senjata nuklir Korea Utara mencatat, tak diketahui apakah Korea Utara r



Sebuah senjata operasional tidaklah sama seperti perangkat peledak nuklir sehingga membutuhkan desain lebih maju dan kemampuan teknik untuk membangunnya," kata mencatumkan dalam SIPRI Yearbook 2013 estimasi 6-8 senjata nuklir untuk menunjukan maksimum yang mungkin dimiliki Korea Utara, berdasarkan informasi publik yang mengenai aktivitas produksi plutoniumnya."

"Namun sekali lagi, masih samir apakah Korea Utara benar-benar memproduksi senjata operasional, sehingga kami tak memasukkannya dalam tabel di siaran pers," tambah

Translated by Fahri Salam

Edited by Budi Setiyono

Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

---

Baca 67 kali

---

Diterbitkan di internasional

---

Lebih lanjut dalam kategori ini: « Nuklir AS-Rusia Mendekap Masa Lalu    Diversifikasi Ringankan Dampak Perubahan Iklim »

### Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (\*). Dilarang menggunakan kata

Pesan \*

tulis pesan Anda disini...

Nama \*

masukkan nama Anda...

Email \*

masukkan alamat e-mail Anda...

Surel situs web

masukkan surel situs Anda...

Anti-spam: complete the task

Joomla CAPTCHA



Berikan komentar

